

## KATA PENGANTAR

Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi mempunyai tugas pokok sebagai pelestari cagar budaya yang ada di wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka-Belitung. Dalam rangka melaksanakan tupoksi tersebut, disusun beberapa sasaran strategis yang berisi kegiatan-kegiatan pendukung, baik sasaran strategis jangka menengah (5 tahunan) maupun jangka pendek (tahunan) guna mempermudah dan memperlancar pencapaian tujuan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, setiap akhir tahun anggaran disusunlah pelaporan yang berisi penjabaran mengenai capaian kinerja masing-masing kegiatan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP dibuat sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yakni “mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”. Berkenaan dengan hal tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi membuat tolok ukur tingkat keberhasilan kinerja pada akhir tahun anggaran guna mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peringkat akuntabilitas kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan disusunnya LAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi diharapkan dapat memberikan informasi mengenai gambaran nyata kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2012. Semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jambi, 22 Januari 2013

Kepala,

Drs. Winston Sam Dauglas Mambo

NIP. 19590522 198903 1 001

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	iii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Instansi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.3.1. Sub Bagian Tata usaha	3
1.3.2. Seksi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3
1.3.3. Kelompok Jabatan Fungsional	3
1.4 Sistematika Penyajian	3
 <b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis 2010-2014	5
2.2 Rencana Kinerja 2012	6
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja 2012	9
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja DIPA APBN Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	9
3.1.2. Evaluasi Hasil dan Pemecahan Masalah	17
3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja DIPA APBN-P Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	22
3.1.4. Evaluasi Hasil dan Pemecahan Masalah	22
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	25
<b>LAMPIRAN</b>	

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pelaporan akuntabilitas kinerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi tahun 2012 berisi informasi mengenai tingkat keberhasilan kinerja selama tahun 2012. Tingkat keberhasilan kinerja ini tidak hanya diukur dari keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, tetapi juga realisasi penyerapan anggaran yang disediakan sesuai dengan DIPA Nomor: 0044/040-04.2.01/05/2011 tanggal 20 Desember 2010, dan DIPA APBN-P Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 5386/023-15.2.01/05/2012 tanggal 5 Oktober 2012

Berdasarkan data yang dihimpun, untuk DIPA APBN capaian kinerja sebesar 94 % kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan 6 % tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah menyerap dana sebesar 87,5 %. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan karena adanya penghematan atau blokir dana dari pusat, serta beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena kendala teknis. Sedangkan untuk DIPA APBN-P capaian kinerja sebesar 32 % dengan tingkat daya serap anggaran sebesar 7,4 %. Pelaksanaan ini terkendala karena waktu pelaksanaan yang tidak cukup, dikarenakan anggaran baru di setujui pada bulan oktober dan baru dapat digunakan pada pertengahan November 2012, dikarenakan adanya proses pengurusan administrasi karena perpindahan nomenklatur dari Kemenparekraf menjadi kemendikbud

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, Balai Pelestarian Cagar Budaya kota Jambi berusaha untuk meningkatkan Strategi, sinergi, kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia, serta melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama.